



## DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN  
UKM

### Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerja Bersama

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai format pada Lampiran V Permenakertrans RI No.28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada Kepala Dinas
2. Mediator meneliti kelengkapan persyaratan formal dan/atau materi naskah PKB
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi dan/atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mediator menyampaikan kepada para pihak agar memenuhi persyaratan dan/atau memperbaiki materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
4. Dalam hal para pihak tetap bersepakat terhadap sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas memberi catatan pada surat keputusan pendaftaran yang memuat mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
5. Setelah diteliti kelengkapan dan/atau kesesuaian materinya dengan peraturan perundang-undangan, surat permohonan diterima dan Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

#### Waktu Penyelesaian



## DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

4 Hari kerja

1. Mediator meneliti kelengkapan persyaratan formal dan/atau materi naskah PKB
2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 tidak terpenuhi dan/atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mediator menyampaikan kepada para pihak agar memenuhi persyaratan dan/atau memperbaiki materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Dalam hal para pihak tetap bersepakat terhadap sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas memberi catatan pada surat keputusan pendaftaran yang memuat mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
4. Setelah diteliti kelengkapan dan/atau kesesuaian materinya dengan peraturan perundang-undangan, surat permohonan diterima dan Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

### Pengaduan Layanan

Kotak saran melalui website : [www.kuduskab.go.id](http://www.kuduskab.go.id)